

BAB V

PENUTUP

5.3. Kesimpulan

Temuan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengarah pada beberapa kesimpulan berikut.

1. Kritisisme Muhammadiyah dipengaruhi baik oleh faktor subjektif Din Syamsudin maupun faktor kondisi objektif.

Pandangan Din Syamsudin terkait situasi sosial politik serta pemikirannya mendorongnya untuk kritis pada pemerintah. Kondisi objektif yaitu adanya liberalisasi ekonomi dan dampaknya bagi rakyat, sistem ketatanegaraan yang makin demokratis, serta kondisi Muhammadiyah sendiri sebagai *civil society* dan karakter Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu. Kritisisme Muhammadiyah muncul sebagai respon atas berbagai persoalan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Berbagai persoalan muncul sebagai wujud materialism dan liberalisasi yang terus berkembang di Indonesia. Dinamika politik diwarnai oleh adanya perebutan sumber daya alam melalui instrumen yang dilegitimasi oleh negara sehingga demokratisasi menjadi kebutuhan bagi Muhammadiyah agar dapat mengontrol negara melalui mekanisme yang diakui oleh negara. Peran Muhammadiyah dalam menata sistem ketatanegaraan pada era reformasi telah memungkinkan Muhammadiyah melakukan kontrol terhadap negara, baik melalui kritik terbuka maupun melalui jalur konstitusional sebagaimana proses *judicial review* yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap sejumlah UU yang menyimpang dari UUD 1945. Pilihan-pilihan rasional (*rational choice*) yang diambil oleh

Muhammadiyah dalam menyikapi berbagai persoalan umat dan bangsa melalui para actor pengurus Muhammadiyah telah menghasilkan manfaat yang maksimal bagi umat dan bangsa Indonesia, bagi Muhammadiyah maupun bagi para actor itu sendiri. Proses pengambilan keputusan secara kolektif kolegial dalam sistem yang berjenjang mulai dari rapat harian, rapat pimpinan, rapat pleno, sidang tanwir hingga muktamar memperjelas sikap dan tindakan Muhammadiyah dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan selalu melalui pertimbangan-pertimbangan yang rasional.

2. Proses Kritisisme Muhammadiyah

Proses kritisisme Muhammadiyah bermula dari kegelisahan pengurus terhadap kondisi negara yang kemudian dibicarakan dalam forum-forum kajian dan forum pengambilan keputusan seperti rapat pimpinan, rapat kerja, sidang tanwir dan muktamar. Kritisisme terhadap pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan migas dilakukan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik yang merupakan organ di dalam Muhammadiyah.

Kritisisme Muhammadiyah terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara merupakan sikap Muhammadiyah dalam melaksanakan *amar makruf nahi mungkar*. Spirit ini menggerakkan Muhammadiyah untuk selalu mengkritisi dan mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap kritis dan keterlibatan Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa sudah berlangsung lama, bahkan sejak berdirinya Muhammadiyah. Sikap kritis yang ditunjukkan dalam forum-forum pengambilan keputusan di internal Muhammadiyah merupakan wujud kepedulian Muhammadiyah terhadap berbagai

persoalan umat dan bangsa yang diartikulasikan oleh para pengurus Muhammadiyah agar didengar dan diperhatikan oleh penyelenggara negara sehingga arah perjalanan bangsa Indonesia tetap sesuai dengan koridor agama, Pancasila dan UUD 1945. Muhammadiyah mampu menjalankan peran tersebut karena Muhammadiyah merupakan *civil society* yang kuat dan mandiri tanpa bergantung pada negara, namun berkepentingan untuk menjaga negara agar memberikan maslahat sebesar-besarnya bagi umat dan bangsa.

3. Dampak Kritisisme

Sikap kritis Muhammadiyah berdampak pada internal maupun eksternal Muhammadiyah. Dampak internalnya yaitu semakin jauhnya hubungan Din Syamsudin dengan para penyelenggara negara terutama dengan Presiden SBY serta tidak adanya kader Muhammadiyah yang masuk dalam struktur Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2. Dampak positifnya, kritisisme berhasil memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai *civil society* berhadapan dengan negara. Dampak eksternalnya yaitu pemerintah mengendalikan penuh pengelolaan sumber daya air, minyak bumi dan gas sebagai kewajibannya dalam mencukupi kebutuhan rakyat. Bagi rakyat Indonesia pada umumnya, kritisisme berdampak pada kembalinya kedaulatan atas sumber daya alam kepada negara sebagai cerminan dari kedaulatan rakyat atas kekayaan alam Indonesia.

5.4.Saran

1. Kritisisme Muhammadiyah terhadap persoalan umat dan bangsa sebaiknya terus dipelihara dengan diikuti proses menyebarluaskan

- kritik Muhammdiyah kepada masyarakat luas sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.
2. Sikap kritis perlu disertai upaya nyata Muhammadiyah dalam meluruskan arah perjalanan bangsa Indonesia agar tidak keluar dari koridor Pancasila dan UUD 1945.
 3. Pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan objektif perlu terus dikemukakan dalam menyikapi setiap problem bangsa dan negara.